

Urgensi Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan pada Kabupaten Lampung Utara

Hendri Sopian

Universitas Terbuka; hendrisopianpbb@gmail.com

* Correspondence: hendrisopianpbb@gmail.com; Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437, Banten, Indonesia

Received: 12-09-2023; Accepted: 14-12-2023; Published: 15-12-2023

Abstrak: Lampung Utara memerlukan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena menjadi salah satu kabupaten tertua di Provinsi Lampung, Lampung Utara seharusnya menjadi kabupaten yang berpengalaman dan maju. Namun fakta yang terjadi tidak sesuai harapan. Penelitian dilakukan sebagai masukan ilmiah untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung Utara. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif menggunakan teknik studi pustaka dan panduan SDGs serta pengalaman daerah lain yang sejenis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Lampung Utara berada pada kuadran 1 dalam analisis SWOT. Sehingga dibutuhkan sejumlah strategi seperti strategi Bottom-Up dan Top-Down untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan dilakukannya sejumlah langkah sesuai hasil penelitian, maka diharapkan tercipta pembangunan yang berkelanjutan untuk membuat Lampung Utara menjadi BETTAH (Bersih, Elok, Tertib, Taqwa, Aman dan Hidup).

Kata Kunci: Lampung Utara; Pembangunan Berkelanjutan; Sejahtera; Strategi; Investasi.

Abstract: Lampung Utara requires sustainable development to improve community welfare. Because it is one of the oldest districts in Provinsi Lampung, Lampung Utara should be an experienced and advanced district. But the fact that happened is not as expected. For this reason, researchers conduct research in providing scientific input to bring progress and prosperity to the people of Lampung Utara. The research methodology used is descriptive analysis using literature study techniques and SDGs guidelines as well as experiences from other similar regions. The research results show that Lampung Utara is in quadrant 1 in the SWOT analysis. So that a number of strategies are needed, such as Bottom-Up and Top-Down strategies to achieve sustainable development. By taking several steps according to the results of the research, it is hoped that sustainable development will be created to make Lampung Utara become BETTAH (Bersih, Elok, Tertib, Taqwa, Aman dan Hidup).

Keywords: Lampung Utara; Sustainable Development; Prosperity; Strategy; Investment.

1. Pendahuluan

Salah satu kabupaten di Provinsi Lampung adalah Lampung Utara. Ibukotanya adalah Kotabumi, yang berjarak lebih dari 100 kilometer dari Bandar Lampung. Secara geografis, Kabupaten Lampung Utara terletak di urutan utara-selatan $4^{\circ}34'$ – $5,06$ Lintang Selatan dan $104^{\circ}30'$ – $105^{\circ}08'$ Bujur Timur. Kabupaten tersebut berbatasan langsung dengan kabupaten:

- a. Bagian Utara : Way Kanan
- b. Bagian Selatan : Lampung Tengah
- c. Bagian Timur : Tulang Bawang Barat
- d. Bagian Barat : Lampung Barat

Secara topografi, dataran rendah yang tertutup oleh awan vulkanis terletak di bagian timur, dan daerah perbukitan di sebelah barat memiliki ketinggian antara 450 dan 1500 meter dari permukaan laut. Kabupaten Lampung Utara adalah kabupaten di Provinsi Lampung. Luasnya 2.725,63 km², atau 7,72 persen dari total luas Provinsi Lampung. Itu terdiri dari 23 kecamatan, 247 desa, dan 5 kelurahan (Lampung Utara, n.d.). Pada tahun 2021, total penduduk Kabupaten Lampung Utara mencapai 634 ribu orang, dengan mayoritas penduduk usia muda dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 67,89 persen, serta tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 66,7 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara, 2022). Karena menjadi salah satu kabupaten tertua di Provinsi Lampung dan didirikan pada tanggal 15 Juni 1946, Kabupaten Lampung Utara harus menjadi kabupaten yang berpengalaman dan maju. Dengan posisi strategis yang berada di jalur tengah lintas Sumatera, seharusnya investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Lampung Utara. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan, jumlah investasi lokal maupun nasional yang berinvestasi dalam Provinsi Lampung di kota/kabupaten selain Lampung Utara meningkat, sebagai contoh: pusat perbelanjaan Chandra, Warung Bakso Sonny, hingga aplikasi Gojek/Grab. Namun sebaliknya, sejumlah investor seperti yang disebutkan tadi enggan untuk melirik Lampung Utara dengan segenap potensi di dalamnya. Bahkan, usaha yang telah ada di Lampung Utara, seperti Ramayana (Admin, 2022), pusat perbelanjaan Taruko (Wikimapia, n.d.) justru gulung tikar. Keengganan investor untuk menanamkan modalnya di Lampung Utara tentu mengganggu terwujudnya pembangunan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Lampung Utara.

Setidaknya terdapat 5 (lima) pilar permasalahan di Kabupaten Lampung Utara, yaitu pilar infrastruktur/pengembangan wilayah, ekonomi, sosial, hukum/pemerintahan, dan lingkungan (Admin, 2023). Masalah infrastruktur/pengembangan wilayah seperti kesenjangan pertumbuhan kota-desa, terbatasnya pembiayaan jalan, keterbatasan irigasi pertanian, kurangnya infrastruktur pelayanan dasar terkait pemukiman dan sanitasi. Masalah ekonomi seperti kurangnya nilai tambah hasil pertanian dan keterampilan/kompetensi SDM. Masalah sosial seperti akses rendah ke pendidikan dan kualitas pendidikan yang buruk. Masalah hukum/pemerintahan seperti pelayanan publik yang tidak efisien. Masalah lingkungan seperti pencegahan bencana dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Menurut (Budiharjo & Sujarto, 2013), pembangunan berkelanjutan adalah ketika sebuah kota terus berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya saat ini dan bersaing dalam ekonomi global sambil mempertahankan keselarasan sosial, budaya,

politik, dan keamanannya tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan Emil Salim (dikutip oleh (Suardi, 2014) mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah proses pembangunan yang menggabungkan manfaat sumber daya alam dan manusia dengan mengoptimalkan pembangunan.

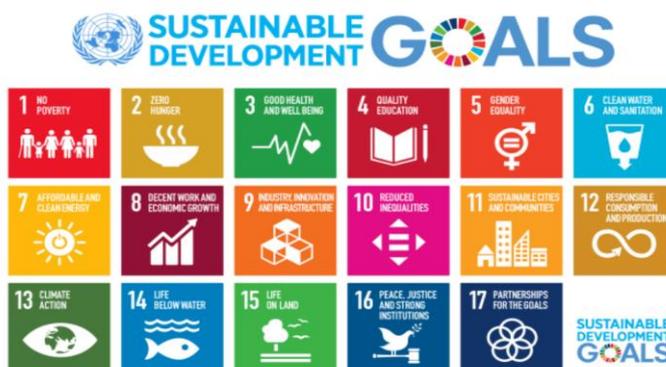
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals, SDGs*) adalah agenda global untuk pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia dan Bumi untuk sekarang dan masa depan. Pada tahun 2030, SDGs bertujuan untuk memberikan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang. SDGs dapat menjawab dua hal, setidaknya, berdasarkan prinsip "Leave no one behind" (Tidak tinggalkan satu pun):

- a. Keadilan Prosedural berarti semua pihak, terutama mereka yang tertinggal, dapat terlibat dalam proses pembangunan secara keseluruhan.
- b. Keadilan Substansial: seberapa baik program pembangunan dan kebijakan dapat menangani masalah masyarakat, terutama kelompok tertinggal.

Pada bulan Agustus 2015, 193 negara mencapai kesepakatan tentang 17 tujuan berikut (Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2023):

- a. Tujuan 1: Tanpa adanya kemiskinan (*No poverty*): yaitu penghapusan kemiskinan di mana-mana.
- b. Tujuan 2: Tanpa rasa lapar (*Zero hunger*): yaitu menghentikan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan nutrisi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.
- c. Tujuan 3: Kehidupan yang sehat dan aman (*Good health and well-being*): yaitu mendukung gaya hidup sehat dan kesejahteraan untuk semua usia.
- d. Tujuan 4: Pendidikan berkualitas tinggi (*Quality education*): yaitu memastikan pendidikan yang layak dan inklusif, dan memberikan kesempatan belajar seumur hidup kepada semua orang.
- e. Tujuan 5: Keadilan gender (*Gender equality*): yaitu mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan setiap perempuan.
- f. Tujuan 6: Air bersih dan higienis (*Clean water and sanitation*): yaitu memastikan bahwa semua memiliki akses ke air dan sanitasi.
- g. Tujuan 7: Energi murah dan bersih (*Affordable and clean energy*): yaitu memungkinkan semua orang mendapatkan energi modern, murah, dapat diandalkan, dan berkelanjutan..

- h. Tujuan 8: Pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan pekerjaan yang layak (*Decent work and economic growth*): yaitu memberikan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang adil, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- i. Tujuan 9: Bisnis, inovasi, dan infrastruktur (*Industry, innovation, and infrastructure*): yaitu membuat infrastruktur yang kuat, mendorong industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong kreativitas.
- j. Tujuan 10: Mengurangi gap (*Reduced inequalities*): yaitu mengurangi perbedaan antara negara dan di dalamnya.
- k. Tujuan 11: Kota dan masyarakat yang berkelanjutan (*Sustainable cities and communities*): yaitu mengubah kota menjadi tempat yang ramah, aman, kuat, dan berkelanjutan.
- l. Tujuan 12: Produksi dan konsumsi bertanggung jawab (*Responsible consumption and production*): yaitu menjamin produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- m. Tujuan 13: Kendali terhadap perubahan iklim (*Climate action*): yaitu mengambil tindakan penting untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
- n. Tujuan 14: Ekosistem di lautan (*Life below water*): yaitu perlindungan dan penggunaan sumber daya laut dan lautan yang berkelanjutan.
- o. Tujuan 15: Ekosistem di atas tanah (*Life on land*): yaitu menjaga hutan secara berkelanjutan, mencegah lahan berubah menjadi gurun, mencegah kerusakan lahan dan mencegah kepunahan keanekaragaman hayati.
- p. Tujuan 16: Perdamaian, keadilan, dan institusi yang teguh (*Peace, justice, and strong institutions*): yaitu menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan inklusif.
- q. Tujuan 17: Partnership untuk mencapai tujuan (*Partnerships for the goals*): yaitu menghidupkan kembali kolaborasi internasional untuk pembangunan berkelanjutan.



Sumber: Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2023

Gambar 1. SDGs

Visi dan misi Lampung Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 mencakup ketujuh belas tujuan SDGs (Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, n.d.). Visi Lampung Utara yaitu: “Masyarakat Lampung Utara Yang Aman, Agamis, Maju, Dan Sejahtera”. Sedangkan misinya yaitu ada 5 (lima):

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung Utara yang berkualitas dan berbudaya;
2. Mewujudkan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan yang mendukung pengembangan sektor strategis;
3. Mewujudkan kestabilan dan kondusivitas daerah;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang prima; dan
5. Mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif di Provinsi Lampung.

Dalam melakukan pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan sejumlah strategi. Peneliti menawarkan 2 (dua) strategi yaitu strategi *Bottom-Up* dan *Top-Down*. Strategi *Bottom-Up* yaitu dengan mengupayakan pembangunan dari unit pemerintahan terkecil, yaitu Desa. Sedangkan strategi *Top-Down* yaitu strategi makro yang dibuat oleh Pemerintah, diantaranya melalui kebijakan yang berdampak sistemik.

Sebenarnya, tidak ada satu pun kabupaten yang miskin; yang miskin hanyalah kabupaten yang tidak cukup diurus (Suyoto, 2017). Pembangunan berkelanjutan menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan kemakmuran manusia (Resolusi PBB, 2015). Jadi, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Lampung Utara sehingga 5 (lima) pilar permasalahan dan enggannya investor untuk masuk dapat teratasi. Sehingga pembangunan berkelanjutan bisa menjadi kunci untuk membuat masyarakat Kabupaten Lampung Utara sejahtera.

2. Metode

Dalam penelitian ini, konsep dasar dari analisis deskriptif yang digunakan adalah panduan SDGs dan metode studi literatur, serta pengalaman daerah lain yang serupa. Tujuannya adalah untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) Kabupaten Lampung Utara dalam membangun secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tujuannya juga adalah untuk menemukan solusi untuk masalah-masalah yang menghambat pembangunan berkelanjutan.

3. Hasil dan Pembahasan

A. SWOT Lampung Utara

Analisis SWOT, singkatan dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman, adalah teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) proyek. Selain digunakan untuk tujuan bisnis, analisis ini juga dapat digunakan untuk menilai kemampuan Kabupaten Lampung Utara. SWOT terdiri dari kekuatan internal dan eksternal. Kekuatan internal terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Kekuatan eksternal terdiri dari peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) (Mekari Jurnal, 2017). Analisis SWOT adalah alat yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dari empat sisi yang berbeda, di mana relevansinya adalah:

- 1) Bagaimana kekuatan (*strengths*) dapat memanfaatkan peluang (*opportunities*) saat ini.
- 2) Bagaimana mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang menghalangi keuntungan.
- 3) Bagaimana kekuatan (*strengths*) dapat menghadapi ancaman (*threats*) saat ini.
- 4) Bagaimana mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang dapat menimbulkan ancaman (*threats*) atau menciptakan ancaman baru.



Sumber: Mekari Jurnal, 2017

Gambar 2. Hubungan dalam SWOT

Kuadran I, Kuadran II, Kuadran III, dan Kuadran IV adalah contoh dari empat kuadran utama yang dihasilkan oleh analisis SWOT. Di kuadran I ada strategi progresif (+,+), di kuadran II ada strategi diversifikasi (+,-), di kuadran III ada strategi perubahan (-,+), dan di kuadran IV ada strategi bertahan. Strategi yang dipilih adalah yang terbaik dan disesuaikan dengan kondisi di dalam dan di luar Kabupaten Lampung Utara (Rangkuti, 2016). Penjelasan tiap kuadran adalah sebagai berikut:

1. Kuadran I

adalah keadaan yang paling menguntungkan karena Anda memiliki keunggulan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Metode yang diusulkan adalah progresif. Singkatnya, Kabupaten Lampung Utara memiliki kesempatan untuk terus berkembang dan mencapai tingkat kemajuan terbaik.

2. Kuadran II

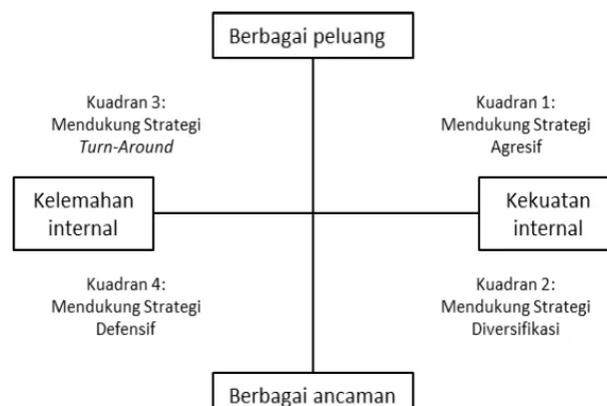
Meskipun ada risiko yang signifikan, keadaan tetap stabil. Singkatnya, strategi yang ditawarkan adalah diversifikasi strategi. Kabupaten Lampung Utara berada dalam kondisi yang baik, tetapi menghadapi banyak ancaman besar, sehingga mungkin masih menjadi masalah jika hanya berfokus pada strategi terdahulu. Akibatnya, kabupaten didorong untuk segera memulai berbagai inisiatif strategisnya.

3. Kuadran III

adalah keadaan yang mengerikan, tetapi juga menawarkan peluang yang sangat baik. Strategi yang diberikan adalah perubahan. Kabupaten Lampung Utara disarankan untuk mengganti strategi sebelumnya karena mereka mungkin kesulitan memanfaatkan peluang yang ada jika hanya bergantung pada strategi sebelumnya.

4. Kuadran IV

Situasi sangat buruk, seta menghadapi masalah besar. Strategi bertahan adalah yang disarankan. Singkatnya, Kabupaten Lampung Utara disarankan untuk menerapkan pendekatan bertahan hidup dengan mengelola faktor internal untuk mencegah situasi menjadi lebih buruk.



Sumber: 123dok

Gambar 3. Posisi Kuadran SWOT

Dalam menyusun SWOT Kabupaten Lampung Utara, Peneliti membuat daftar pertanyaan seperti berikut:

Strength (Kekuatan)

1. Apa keunggulan Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Kabupaten Lampung Utara dapat diunggulkan dari kabupaten lain?
3. Faktor apa yang mendorong mendatangkan investasi ke Kabupaten Lampung Utara?
4. Menurut pendapat masyarakat, apa keuntungan yang dimiliki Kabupaten Lampung Utara?
5. Apa keistimewaan Kabupaten Lampung Utara?

Weakness (Kelemahan)

1. Apa yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan Kabupaten Lampung Utara?
2. Apa yang harus dihindari?
3. Apa kelemahan yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Utara?
4. Kondisi apa yang berpotensi mengganggu investasi di Kabupaten Lampung Utara?
5. Apa yang telah dilakukan oleh kabupaten lain untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dibandingkan dengan Kabupaten Lampung Utara?

Opportunity (Peluang)

1. Bagaimana Anda melihat peluang?
2. Apakah ada kecenderungan yang sedang terjadi saat ini yang sesuai dengan manajemen Kabupaten Lampung Utara?

Threat (Ancaman)

1. Apakah ada perkembangan yang mungkin menimbulkan ancaman bagi Kabupaten Lampung Utara?
2. Hambatan apa yang saat ini dihadapi?
3. Apa yang telah dilakukan oleh kabupaten lain?
4. Apakah ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau provinsi yang dapat membahayakan kemajuan Kabupaten Lampung Utara?

Berdasarkan daftar pertanyaan tersebut, Jawaban yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Strength (Kekuatan)

1. Kelebihan yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Utara yaitu tanah yang subur dan penghasil berbagai produk pertanian (Mulyono, 2011).
2. Yang bisa membuat Kabupaten Lampung Utara agar lebih baik dari Kabupaten lainnya yaitu dalam sektor industri bahan baku lebih mudah didapatkan dan rata-rata bernilai ekonomis tinggi (Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Lampung, 2020).
3. Hal yang menyebabkan Kabupaten Lampung Utara memperoleh mendatangkan investasi yaitu kemudahan regulasi investasi dan perizinan (Kupastuntas.co, 2018).
4. Kelebihan Kabupaten Lampung Utara yang dilihat maupun dirasakan oleh masyarakat yaitu pemerintah memberikan dukungan dalam meningkatkan etos kerja dan kewirausahaan bagi masyarakat (Dinas PPPA Provinsi Lampung, 2022).
5. Keunikan yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Utara yaitu pemerintah mampu meningkatkan rasa percaya diri akan potensi daerah dan budaya daerah Lampung (Sukarta, 2020).

Weakness (Kelemahan)

1. Hal yang harus ditingkatkan pada tata kelola Kabupaten Lampung Utara yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan anggaran daerah yang relatif kecil dan terbatas, dimana pada 2020 PAD hanya sebesar 108 milyar (6,7%) dibandingkan seluruh pendapatan sebesar 1,6 triliun (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara, 2022).
2. Hal yang harus dihindari dalam pengelolaan Kabupaten Lampung Utara yaitu kondisi tingkat kriminalitas dan premanisme masih tinggi serta tingginya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Ristiananto, 2019).
3. Kelemahan yang dilihat maupun dirasakan oleh masyarakat dari Kabupaten Lampung Utara yaitu dalam sektor industri dan pertanian mayoritas masih dilakukan secara tradisional (Budiman, 2013).
4. Faktor yang dapat menghilangkan investasi pada Kabupaten Lampung Utara yaitu tingkat keterampilan, manajerial dan pendidikan SDM yang relatif rendah, dicerminkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada 2021 mencapai 6,14 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara, 2022).
5. Yang telah dikerjakan Kabupaten lain untuk menjadi lebih baik dari Kabupaten Lampung Utara yaitu misalnya Kabupaten Lampung Barat, memiliki tingkat pengangguran terbuka pada 2021 paling rendah se-Provinsi Lampung yaitu 2,8 persen, sehingga angka kriminalitas juga ikut rendah (di mana kriminalitas berbanding lurus

dengan tingkat pengangguran). Berbeda dengan Kab. Lampung Utara yang memiliki tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,14 persen (Wahyudi, 2022).

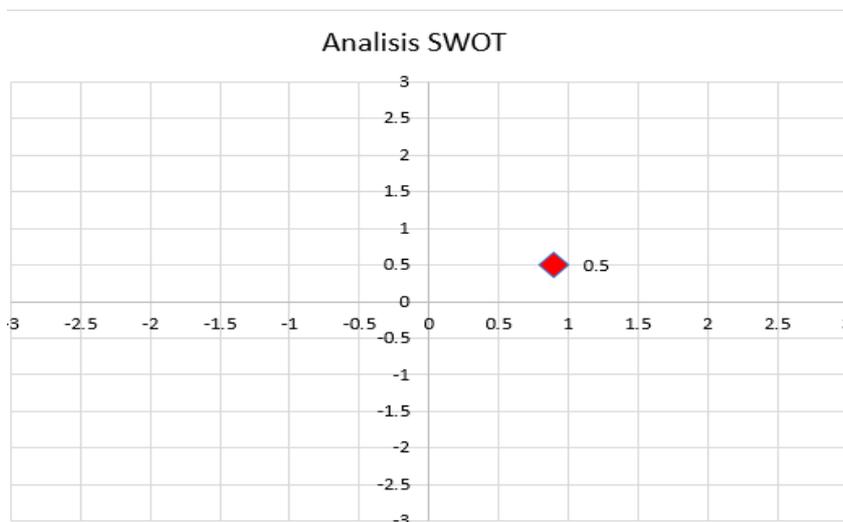
Opportunity (Peluang)

1. Kesempatan yang bisa dilihat yaitu Kebijakan yang dibuat dan dukungan yang cukup dari pemerintah pusat dan provinsi dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain (Balitbangda Provinsi Lampung, 2019).
2. Tren saat ini yang sejalan dengan tata kelola Kabupaten Lampung Utara yaitu munculnya peluang besar pasar pariwisata bagi masyarakat domestik dan mancanegara (Admin, 2021) serta terbukanya peluang bagi investor untuk melakukan investasi (Budiman, 2013).

Threat (Ancaman)

1. Perkembangan yang potensial menjadi ancaman untuk Kabupaten Lampung Utara yaitu dengan adanya jalan Tol Sumatera, sehingga masyarakat yang melintasi Kabupaten Lampung Utara sebagai wilayah perlintasan Lintas Tengah Sumatera menjadi turun (Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, 2022).
2. Hambatan yang sekarang sedang dihadapi yaitu meningkatnya tingkat kriminalitas yang mengganggu iklim bisnis yang sehat (Sarnubi, 2015).
3. Hal yang telah dilakukan oleh Kabupaten/Kota lain yaitu misalnya Bandar Lampung yang memiliki daya tarik lebih dalam menarik investor dibandingkan Kabupaten Lampung Utara (Pemerintah Provinsi Lampung, 2013).
4. Perubahan dari kebijakan pemerintah pusat/provinsi yang bisa mengancam kemajuan Kabupaten Lampung Utara yaitu adanya pemotongan APBD akibat Covid-19 maupun pemotongan anggaran dengan berbagai alasan, sehingga mengganggu jalannya roda birokrasi/inovasi pemerintah daerah (Rekanza, 2020).

Peneliti melakukan analisis *Internal Factor Analysis Strategy* (IFAS) dan *External Factor Analysis Strategy* (EFAS) atas Kabupaten Lampung Utara berdasarkan keempat faktor dalam analisis SWOT tersebut di atas. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai IFAS 0,9 dan nilai EFAS 0,5, yang berarti bahwa Kabupaten Lampung Utara berada pada Kuadran 1 dalam grafik analisis SWOT, dan menurut analisis tersebut, Kabupaten Lampung Utara memiliki kemampuan untuk menerapkan Strategi Pengembangan Berkelanjutan, yaitu. Strategi yang diusulkan Peneliti yaitu strategi *bottom-up* dan strategi *top-down* sesuai uraian berikutnya.



Sumber: Olahan Peneliti

Gambar 4. Hasil Analisis SWOT

B. Strategi *Bottom-Up*

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Utara, Peneliti merekomendasikan strategi *Bottom-Up*, yaitu strategi yang dibuat dari bawah/dari unit pemerintahan terkecil, yaitu Desa. Setidaknya ada 4 (empat) strategi dalam optimalisasi pembangunan berkelanjutan di Desa di Lampung Utara yaitu (Kementerian Desa, 2015):

- 1) Pembangunan desa partisipatif adalah upaya untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengutamakan kekeluargaan, kegotongroyongan, dan perdamaian sosial sebagai prioritas utama.
- 2) Sinergitas pihak berwenang, yang berarti peningkatan koordinasi dan keterlibatan aktif dari semua pihak berwenang, termasuk organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha, universitas, dan media, untuk mendukung dan mengorganisasi tindakan setiap pihak dan aktor dalam sistem sekaligus mencegah tumpang tindih.
- 3) Pembangunan ekonomi lokal berbasis produksi yang mandiri yang mendukung upaya penguatan ekonomi nasional melalui ketahanan pangan dan energi yang kuat.
- 4) Percepatan distribusi dan pemanfaatan Dana Desa untuk mendorong sektor ekonomi rill desa.

Desa, sebagai bagian terendah dari pemerintahan, pasti sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Selain itu, Dana Desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada desa dan dikirim pada APBD Kabupaten/kota. Dana ini dipakai untuk belanja operasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain Dana Desa, ada juga Alokasi Dana Desa. Yang pertama berasal dari APBN, sedangkan yang kedua berasal dari APBD (KPPN Bukittinggi, 2021).

Adapun tujuan Alokasi Dana Desa ada 7 (tujuh) di mana hal tersebut sesuai dengan prinsip pembangunan keberlanjutan dalam SDGs, yaitu:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi disparitas sosial.
2. Meningkatkan kualitas penganggaran dan perencanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mengadvokasi pembangunan infrastruktur di daerah pertanian yang didasarkan pada keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya yang lebih baik.
5. Meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat desa.
6. Meningkatkan kemandirian dan kolaborasi masyarakat desa.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakatnya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tiga puluh persen dana desa dialokasikan untuk tujuan penyelenggaraan pemerintah desa, seperti pembiayaan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Di sisi lain, tujuh puluh persen dana desa dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan ekowisata (KPPN Kotabumi, 2021). Sedangkan dalam penggunaan Dana Desa, tentu ada prioritas yang harus dilakukan. Hal ini juga sejalan dengan program dalam SDGs. Dana Desa diberi prioritas untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada kondisi dan potensi desa. Ini sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes):

1. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan Posyandu, dan pembinaan dan pengelolaan PAUD adalah bagian dari kebutuhan dasar.

2. Pembangunan sarana dan prasarana desa: Ini mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, jalan usaha tani, embung, energi baru dan terbarukan, sanitasi lingkungan, pengelolaan air bersih berskala desa, dan irigasi tersier.
3. Membangun potensi ekonomi lokal membantu masyarakat desa menjadi wirausahawan, meningkatkan pendapatan, dan memperluas skala ekonomi.

Sebagai bagian penting dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, semua kegiatan yang didanai Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara publik dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Semua kegiatan harus memiliki bukti administratif, teknis, dan hukum. Dana Desa digunakan dengan cara yang tepat, ekonomis, berkeadilan, efisien, efektif dan terkendali. Sehingga dengan pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien, maka seharusnya masyarakat desa di Kabupaten Lampung Utara akan mencapai kesejahteraan. Karena Dana Desa bertujuan untuk menunjukkan komitmen negara untuk melindungi dan memberdayakan desa agar mandiri, kuat, maju, dan demokratis. Dengan bantuan Dana Desa, desa dapat membangun dan memberdayakan desa untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera. Namun dalam menjaga agar tidak terjadi penyimpangan pada Dana Desa, maka penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) harus ikut mengawasi penggunaannya (Supriyono, 2021).

C. Strategi *Top-Down*

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Utara, selain merekomendasikan strategi *Bottom-Up*, Peneliti juga merekomendasikan strategi *Top-Down* yaitu strategi berupa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah yang berdampak sistemik pada masyarakat. Agar pembangunan berjalan dengan baik maka pemerintah Indonesia hendaknya memiliki konsistensi dalam menggulirkan reformasi birokrasi pada tingkat pemerintah pusat dan daerah (Sholihah & Mulianingsih, 2023). Setidaknya telah ada 4 (empat) upaya pemerintah Indonesia yang berdampak juga pada kondisi di Lampung Utara di dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi (Hajrudin, 2021):

1. Mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja
tepatnya dengan mengesahkan Omnibus Law tentang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 pada 2 November 2020. Tujuan dari pengesahan Omnibus Law adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk investasi dan usaha, yang akan menghasilkan lapangan kerja baru di Indonesia. Pengaturan mencakup penyederhanaan proses perizinan bisnis, yang meningkatkan ekosistem investasi dan

kegiatan berusaha; pemberdayaan, kemudahan dan perlindungan UMKM; dan peningkatan investasi pemerintah dan proyek strategis nasional; dan ketenagakerjaan.

2. Menerbitkan OSS-RBA

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah sistem perizinan berusaha yang dibangun berdasarkan tingkat risiko dan skala kegiatan usaha. Ini merupakan pembaharuan dari OSS versi pertama dan menggabungkan pendekatan risiko dengan sistem *online*. Tujuan OSS-RBA adalah untuk meningkatkan transparansi dan transparansi proses perizinan usaha. Sistem OSS yang terintegrasi memungkinkan proses permohonan izin menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih transparan, dan lebih kredibel. Selain itu, usaha mikro dan kecil dapat memperoleh sertifikasi halal dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Ini juga selaras dengan temuan penelitian oleh (Riswati, 2021) yang menyatakan bahwa sistem digital yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan, yang melakukan updating data secara konsisten dan sungguh-sungguh, akan mampu mendorong peningkatan kesadaran bersama dan kesamaan persepsi untuk melakukan perbaikan bersama. Pada konteks yang lebih besar, ini akan memungkinkan pertumbuhan lingkungan bersama untuk pertumbuhan inovasi dan ide-ide strategis untuk membangun daerah.

3. Menerbitkan Daftar Prioritas Investasi (DPI)

Daftar Prioritas Investasi (DPI), yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dan terdiri dari tiga bidang, yaitu:

a. Sektor Prioritas

Yang termasuk dalam sektor prioritas adalah proyek padat modal, strategis nasional, dan berfokus pada ekspor, teknologi tingkat tinggi, dan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

b. Sektor yang diperuntukkan bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

Perusahaan besar harus bekerja sama dengan UMKM lokal untuk menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku usaha, baik besar maupun kecil. Dengan melakukan ini, bisnis akan diizinkan dan didorong.

c. Sektor dengan pembatasan tertentu

Sektor terbatas adalah jenis bisnis dengan sebagian besar modal dalam negeri dan sebagian besar modal asing.

Investasi di sektor prioritas akan menerima insentif fiskal dan non fiskal. Insentif fiskal termasuk pengurangan pajak penghasilan, pengurangan pajak untuk

penghasilan kena pajak, dan pembebasan bea impor. Insentif non fiskal termasuk kemudahan perizinan usaha, perizinan untuk melakukan kegiatan usaha, penyediaan infrastruktur pendukung, dan jaminan ketersediaan energi atau bahan baku. Kedua insentif bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

4. Mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI)

LPI dibuat untuk membuat investor percaya pada lembaga investasi dengan tata kelola yang baik. Selain itu, mereka ingin meningkatkan, memprioritaskan, dan mengoptimalkan investasi jangka panjang untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Selain itu, LPI diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

Dengan ditelurkannya 4 (empat) kebijakan nasional di atas, maka Kabupaten Lampung Utara juga berpeluang untuk mendatangkan/meningkatkan investasi. Karena pertumbuhan ekonomi sangat terkait dengan lingkungan investasi yang menarik bagi investor. Sangat penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia setelah pandemi, termasuk di Kabupaten Lampung Utara. Dengan menciptakan daya tarik investasi pada Lampung Utara, maka setidaknya akan mendatangkan 4 (empat) manfaat (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bantul, 2021):

- a. Menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu dengan munculnya bisnis akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
- b. Meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, yaitu dengan munculnya lapangan pekerjaan, daya beli konsumen dan konsumsi rumah tangga akan meningkat.
- c. Perputaran ekonomi yang merata, yaitu transaksi ekspor-impor, investasi swasta, dan konsumsi rumah tangga berkorelasi satu sama lain. Penurunan akan berdampak langsung pada dua komponen lainnya.
- d. Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu peningkatan penanaman modal, akan berdampak positif pada aktivitas produksi barang dan jasa, sehingga meningkatkan konsumsi rumah tangga. Peningkatan PDB juga akan mendukung upaya pembangunan pemerintah dan pembangunan infrastruktur yang menarik investor.

D. Pelajaran dari Kabupaten Lain Yang Dapat Diteladani oleh Kabupaten Lampung Utara

Suyoto (2017) memperkenalkan pembangunan dengan istilah “Bojonegoro Way”. Suyoto berpendapat bahwa tidak ada satu pun provinsi, kabupaten, atau negeri yang miskin; yang ada hanyalah provinsi, kabupaten, atau negeri yang rusak akibat tindakan yang tidak tepat. Dalam mengelola pembangunan, para pemangku kekuasaan seharusnya memberi prioritas kepada segala kemungkinan terbaik dan paling efisien. Salah satunya adalah Kabupaten Bojonegoro, yang bangkit dari kondisi yang buruk.

Pada tahun 1900-an, Kabupaten Bojonegoro terkenal dengan kemiskinan alami. Bojonegoro masih dianggap sebagai kabupaten termiskin di Jawa Timur (Jatim) pada tahun 2000. Namun, pada tahun 2008, itu naik menjadi nomor tiga di Jatim. Selain itu, berhasil lolos dari sepuluh kabupaten/kota termiskin di Jawa Timur pada tahun 2017.

Ada 6 (enam) pilar dalam membangun “Bojonegoro Way”, yaitu:

1. Pemerintah harus berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah rakyat melalui pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam kebanyakan kasus, masalah yang dihadapi masyarakat dapat dikategorikan dalam empat kategori:
 - a. Meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga mereka dapat hidup lebih lama,
 - b. Meningkatkan kecerdasan masyarakat sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan dan potensi mereka untuk hidup yang lebih baik,
 - c. Meningkatkan pendapatan dan daya beli, dan
 - d. Meningkatkan rasa bahagia dan kesejahteraan.Penyelesaian empat masalah ini harus mencakup masalah seperti pengelolaan lingkungan hidup, pembuatan regulasi, tata kelola, dan pembangunan infrastruktur.
2. Solusi masalah yang berkelanjutan harus menjadi fokus utama dalam pengelolaan anggaran. Tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk memperbaiki struktur organisasi saat ini, yang kemudian dievaluasi menggunakan metode kinerja dasar. Keuntungan publik, atau keuntungan publik, lebih penting daripada keuntungan pemerintah. Presiden Joko Widodo menyebut tujuan dalam anggaran seperti "uang ikuti program", sementara Bojonegoro Way menyebut "uang ikuti masalah", "uang untuk penyelesaian", dan "uang untuk pembangunan berkelanjutan".
3. Tata kelola pembangunan tidak terbatas pada satu unit organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan mengatasi masalah strategis bersama, kebanggaan sektoral dapat

diselesaikan. Sebagai contoh, dinas pertanian tidak hanya bertanggung jawab atas masalah produksi pangan; sebaliknya, dinas itulah yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur air, jalan, dan perdagangan untuk memastikan bahwa target produksi pangan tercapai.

4. Dalam praktiknya, semua tingkat pemerintahan, terutama dalam hal pembangunan desa dan kawasan tertentu, bertindak sesuai dengan kewenangan mereka untuk menuntaskan problema yang ditemui oleh penduduk di wilayah tersebut. Sebagai contoh, Bojonegoro mengadopsi gerakan desa sehat dan cerdas (GDSC), yang menentukan tujuan pembangunan desa berdasarkan masalah besar yang ditemui oleh warga lokal. Akibatnya, program pembangunan desa yang dikendalikan oleh pemerintah desa (Pemdes) dan semua anggaran yang dialokasikan ditujukan sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Pemkab mendukung, mendorong, dan mendukung solusi tersebut. Jika solusi yang dibutuhkan oleh program pemerintah provinsi dan pusat, seperti dalam kasus bencana yang disebabkan oleh kerusakan hutan dan sungai, kedua tingkat pemerintahan ini, bersama dengan pemkab, akan mengerahkan semua sumber daya yang tersedia untuk membuat solusi yang bermanfaat untuk penduduk di wilayah tersebut. Oleh karena itu, distribusi kewenangan jangan dianggap sebagai cara untuk menjauhkan kekuasaan dari problema yang dihadapi warga. Sebaliknya, setiap aspek pembangunan dan otoritas harus dirancang untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi warga. Ini adalah inti dari pemerintah yang hadir: melayani rakyatnya.
5. Pemerintah harus memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka untuk memastikan mekanisme *problem-driven base* dan keberlanjutan antara kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Sejak perencanaan, penganggaran, pengadaan, dan pelaporan, pemerintah memastikan bahwa semua proses politik dan teknokratik, serta pengerjaan proyek pembangunan, tersedia bagi masyarakat umum. Platform LAPOR, kontrak data terbuka standar, dan revolusi data sangat penting untuk menjamin mekanisme keberlanjutan tersebut. Jika kinerja basis bertumpu pada birokrasi sendiri, masalah basis akan lebih terfokus pada input, proses, dan output kelembagaan. Akibatnya, masalah basis akan lebih terfokus pada pendapatan dan hasil bagi masyarakat umum. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Lubis, 2022) yang menjelaskan bahwa kotak saran/masukan diperlukan sebagai alat kontrol masyarakat dalam menyampaikan masukan/kritik yang bersifat konstruktif.

6. Bagaimana cara menghitung tingkat keberhasilan pembangunan wilayah? Untuk melakukannya, gunakan pendekatan hasil yang dikenal sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kunci kesuksesan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). IKU meliputi perkembangan ekonomi, indeks rasio kesenjangan, dan keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan angka harapan hidup rakyat. Sementara itu, SDGs mengestimasi semua elemen dan komponen yang akan memastikan keberlangsungan perjalanan ekonomi.

6 (enam) pilar dalam membangun “Bojonegoro Way” tersebut sejatinya sejalan dengan esensi yang ada pada SDGs, yang dapat diadopsi oleh Lampung Utara untuk dapat mencapai kesejahteraan yang sama. Sehingga dengan menyinergikan strategi *bottom-up* dan *top-down* sesuai analisis SWOT tadi serta ditambah dengan mencontoh kesuksesan daerah lain yang memiliki kondisi sebelumnya yang *apple to apple*, maka niscaya Lampung Utara dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

4. Kesimpulan

Menurut analisis Potensi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (SWOT), Kabupaten Lampung Utara berada pada kuadran 1 dan memiliki kelebihan untuk memanfaatkan peluang untuk membangun secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Metode yang diusulkan adalah progresif. Singkatnya, Kabupaten Lampung Utara memiliki kesempatan untuk terus berkembang dan mencapai tingkat kemajuan terbaik. Solusi atas permasalahan yang menghambat pembangunan berkelanjutan Kabupaten Lampung Utara yaitu dengan menerapkan strategi *Bottom-Up* dan *Top-Down*. Strategi *Bottom-Up* mengedepankan pada upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dimulai dari pemerintahan terbawah yaitu Desa. Sedangkan strategi *Top-Down* berangkat dari kebijakan atas yang dibuat oleh pemerintah sehingga memiliki dampak sistemik dalam menjaga pembangunan berkelanjutan serta mewujudkan Lampung Utara BETTAH (Bersih, Elok, Tertib, Taqwa, Aman dan Hidup). Selain itu, perlunya Kabupaten Lampung Utara untuk mengambil pelajaran sebagai pedoman pada kabupaten lain yang telah sukses dalam membangun daerahnya. Dalam prinsipnya, strategi SWOT bukanlah jawaban pasti yang dapat menyelesaikan semua masalah. Namun, setidaknya akan membelah masalah yang ada menjadi segmen kecil yang membuat jadi lebih mudah dipahami. Perlunya penelitian lanjutan oleh pihak lain dengan

metode/pendekatan berbeda sehingga memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Daftar Pustaka

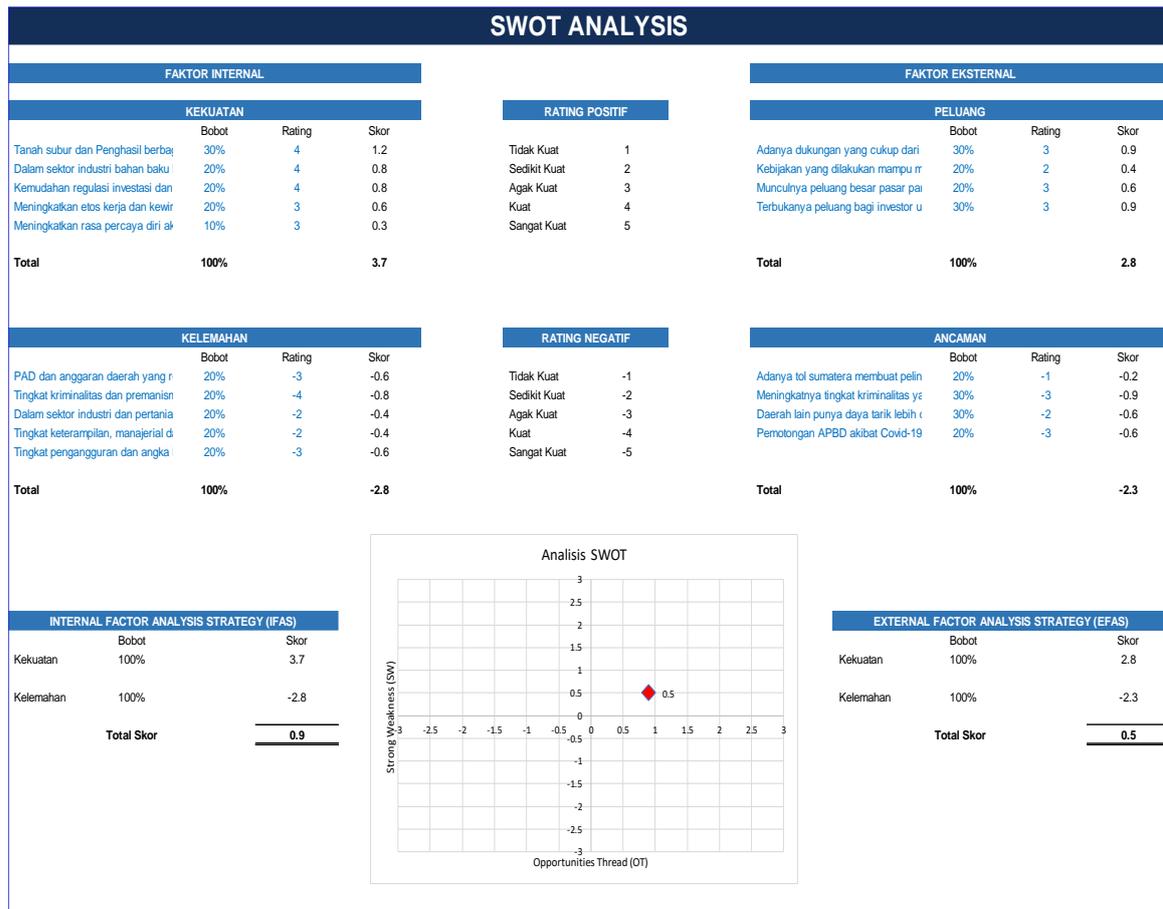
- Admin. (2021). *75 Tahun Kabupaten Lampung Utara, 45 Tempat Wisata Terdata*. <https://Realitalampung.Com/2021/06/20/75-Tahun-Kabupaten-Lampung-Utara-45-Tempat-Wisata-Terdata/>.
- Admin. (2022). *Ramayana Store Kotabumi Merugi Akhirnya Ditutup*. <https://Lampung.Kejarfakta.Co/News/35250/Ramayana-Store-Kotabumi-Merugi-Akhirnya-Ditutup>.
- Admin. (2023). *Musrenbang RKPD Tahun 2024 Lampung Utara*. <https://Bappeda.Lampungprov.Go.Id/Berita-Musrenbang-Rkpd-Tahun-2024-Lampung-Utara.Html>.
- Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR. (2022). *Dahulu Hingga 12 Jam Perjalanan, Kini Mudik Lampung - Palembang Cukup 3,5-4 Jam Via Tol Trans Sumatera*. <https://Bpjt.Pu.Go.Id/Berita/Dahulu-Hingga-12-Jam-Perjalanan-Kini-Mudik-Lampung-Palembang-Cukup-35-4-Jam-via-Tol-Trans-Sumatera>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara. (2022). *Kabupaten Lampung Utara Dalam Angka 2022*. <https://lampungutarakab.bps.go.id/publication/2022/02/25/9ea6b23f60d390e1d5509e21/kabupaten-lampung-utara-dalam-angka-2022.html>
- Balitbangda Provinsi Lampung. (2019). *Potensi Lampung Dilirik Investor, Gubernur Arinal Terima Audiensi Kadin Indonesia*. <https://Www.Balitbangda.Lampungprov.Go.Id/Index.Php/Detail-Post/Potensi-Lampung-Dilirik-Investor-Gubernur-Arinal-Terima-Audiensi-Kadin-Indonesia>.
- Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Lampung. (2020). *Pemprov Lampung Tawarkan Peluang Investasi dalam Ajang Indonesia Business Infrastructure Investment Forum 2020*. <https://Biroadpim.Lampungprov.Go.Id/Detail-Post/Pemprov-Lampung-Tawarkan-Peluang-Investasi-Dalam-Ajang-Indonesia-Business-Infrastructure-Investment-Forum-2020>.
- Budiharjo, E., & Sujarto, D. (2013). *Kota Berkelanjutan (Sustainable City)*. Alumni.
- Budiman, B. (2013). *Kabupaten Lampung Utara Bisa Lebih Maju*. <https://Lampung.Antarnews.Com/Berita/268488/Kabupaten-Lampung-Utara-Bisa-Lebih-Maju>.
- Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2023). *SDGs*. <https://Sdgs.Un.Org/Goals>.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bantul. (2021). *Pentingnya Investasi dalam Pemulihan Ekonomi*. <https://Dpmppt.Bantulkab.Go.Id/Web/Berita/Detail/531-Pentingnya-Investasi-Dalam-Pemulihan-Ekonomi>.

- Dinas PPPA Provinsi Lampung. (2022). *Bimtek Ekonomi Kreatif di Desa Muallng Maya Kotabumi Selatan*. <https://Dinaspppa.Lampungprov.Go.Id/Detail-Post/Bimtek-Ekonomi-Kreatif-Di-Desa-Muallng-Maya-Kotabumi-Selatan>.
- Hajrudin, Y. (2021). *4 Strategi Pemerintah Untuk Menarik Investor Berinvestasi di Indonesia*. <https://Dpmpptsp.Jambiprov.Go.Id/Berita/Showmore/82/4-Strategi-Pemerintah-Untuk-Menarik-Investor-Berinvestasi-Di-Indonesia>.
- Kementerian Desa, P. D. T. dan T. R. I. (2015). *4 Langkah Strategis Mensejahterakan Desa*. <https://Kemendesa.Go.Id/Berita/View/Detail/1592/4-Langkah-Strategis-Mensejahterakan-Desa>.
- KPPN Bukittinggi. (2021). *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya*. <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Bukittinggi/Id/Data-Publikasi/Artikel/2951-Dana-Desa-Pengertian,-Sumber-Dana,-Penyaluran-Dana,-Dan-Prioritasnya.Html>.
- KPPN Kotabumi. (2021). *Dana Alokasi Umum (DAU)*. <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Kotabumi/Id/Informasi/Dana-Transfer/Dana-Alokasi-Umum.Html>.
- Kupastuntas.co. (2018). *Sri Mulyana Ajak Pengusaha Investasi di Lampung Utara*. <https://Www.Kupastuntas.Co/2018/09/24/Sri-Mulyana-Ajak-Pengusaha-Investasi-Di-Lampung-Utara>.
- Lampung Utara. (n.d.). *Sejarah Kabupaten Lampung Utara*. <https://Lampungutarakab.Go.Id/Sejarah-Lampung-Utara/>.
- Lubis, B. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Inovatif dan Kolaboratif Dimasa Pandemi Covid 19 di Kota Cimahi. *Jurnal Media Birokrasi*, 67–76. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i1.2337>
- Mekari Jurnal. (2017). *Pahami Analisis SWOT Perusahaan, Simak Contoh Ini!* <https://Www.Jurnal.Id/Id/Blog/2017-Manfaat-Faktor-Yang-Memengaruhi-Dan-Contoh-Analisis-Swot/>.
- Mulyono, A. dkk. (2011). Kesesuaian Lahan di Dataran Tufa Masam Kotabumi. *Prosiding Pemaparan Hasil Penelitian Puslit Geoteknologi LIPI*.
- Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. (n.d.). *Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara*. <https://Lampungutarakab.Go.Id/Visi-Dan-Misi/>.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2013). *Investor Bandar Lampung Mendominasi Pasar Modal Lampung*. <https://Lampungprov.Go.Id/Detail-Post/Investor-Bandar-Lampung-Mendominasi-Pasar-Modal-Lampung>.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021
- Rangkuti, F. (2016). *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT* (Edisi Duapuluh Dua). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rekanza, H. (2020). *Ikuti Instruksi Menteri, Anggaran Dana Desa di Lampung Utara Dipangkas Untuk Penanganan Corona*. <https://Lampungpro.Co/Post/27538/Ikuti->

Instruksi-Menteri-Anggaran-Dana-Desa-Di-Lampung-Utara-Dipangkas-Untuk-Penanganan-Corona.

- Ristiano, C. (2019). *Modus Korupsi Proyek ala Bupati Lampung Utara*. <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/10/08/06502641/Modus-Korupsi-Proyek-Ala-Bupati-Lampung-Utara>.
- Riswati, R. (2021). Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Digitalisasi Teknologi Di Indonesia. *Jurnal Media Birokasi*, 1–15. <https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2474>
- Sarnubi. (2015). *Polres Lampung Utara ekspose penangkapan begal*. <https://Lampung.AntaraneWS.Com/Berita/283386/Polres-Lampung-Utara-Ekspose-Penangkapan-Begal>.
- Sholihah, L., & Mulianingsih. (2023). Reformasi Birokrasi (Reposisi dan Penerapan E-Government). *Jurnal Media Birokasi*, 5(1).
- Suardi. (2014). *Problematika Penerapan Prinsip Sustainable Development Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Ham. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.321>
- Sukarta, A. W. (2020). *Lampung Utara gelar Kotabumi Art Festival 2020*. <https://Lampung.AntaraneWS.Com/Berita/457777/Lampung-Utara-Gelar-Kotabumi-Art-Festival-2020>.
- Supriyono, H. (2021). *Kejari Kotabumi Tangani Tiga Kasus Korupsi DD dan ADD Sepanjang 2020-2021*. <https://M.Lampost.Co/Berita-Kejari-Kotabumi-Tangani-Tiga-Kasus-Korupsi-Dd-Dan-Add-Sepanjang-2020-2021.Html>.
- Suyoto. (2017). *Cara Lain Membangun Daerah*. <https://Www.Jawapos.Com/Opini/Sudut-Pandang/20/06/2017/Cara-Lain-Membangun-Daerah/>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Wahyudi, E. (2022). *Tingkat Pengangguran Terbuka di Lambar Terendah*. <https://Www.Kupastuntas.Co/2022/03/14/Tingkat-Pengangguran-Terbuka-Di-Lambar-Terendah>.
- Wikimapia. (n.d.). Department Store Toserba Taruko (Kotabumi). In <http://wikimapia.org/35734251/id/Department-Store-Toserba-Taruko>.

Lampiran



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).